



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT KOMISI IX DPR RI**

- 
- Tahun Sidang : 2018-2019  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke : 2  
Jenis Rapat : Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat  
Dengan : 1. Menteri Kesehatan RI;  
2. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN);  
3. Direktur Utama BPJS Kesehatan
- Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Senin, 27 Agustus 2018  
Pukul : 14.00 WIB – selesai  
Acara : 1. Meminta penjelasan Kementerian Kesehatan RI tentang pelaksanaan Program Imunisasi Measles Rubella (MR) dan penjelasan atas dugaan adanya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) selama pelaksanaan program ini.  
2. Meminta penjelasan Kementerian Kesehatan RI, DJSN dan BPJS Kesehatan tentang evaluasi terhadap tata kelola obat untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan dan keluhan masyarakat atas pelayanan obat JKN;  
3. Meminta penjelasan BPJS Kesehatan tentang:  
a. Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak dalam program jaminan kesehatan;  
b. Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan bayi lahir sehat, dan  
c. Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik, yang telah diimplementasikan sejak 25 Juli 2018 meskipun organisasi profesi terkait mendesak BPJS Kesehatan untuk melakukan penundaan dari peraturan tersebut;  
4. Meminta penjelasan Kementerian Kesehatan RI dan DJSN atas sikap yang diambil terhadap ketiga

Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan tersebut di atas.

- Ketua Rapat : Dede Yusuf M.E, ST, M.I.Pol/Ketua Komisi IX DPR RI  
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto/Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI  
Lantai I Gedung Nusantara I  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat  
Hadir : A. 24 orang dari 47 orang Anggota Komisi IX DPR RI;  
2 orang izin;  
B. Menteri Kesehatan RI, Nila F. Moeloek beserta jajaran;  
C. Ketua DJSN, Dr. Sigit Prihutomo beserta jajaran;  
D. Dirut BPJS Kesehatan diwakili Wahyudin Bagenda, Direktur Teknologi Informasi beserta jajaran.

## I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Ketua DJSN serta Direktur Utama BPJS Kesehatan dibuka pukul 14.10 WIB, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemangku kepentingan terkait untuk **mengintensifkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)** tentang berbagai hal terkait imunisasi Measles-Rubella (MR), termasuk Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk dari SII (*Serum Institute of India*) Untuk Imunisasi, melalui media KIE yang jelas, komprehensif dan komunikatif serta menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat.
2. Dengan mempertimbangkan bahwa pengaturan pelayanan kesehatan JKN diatur oleh Peraturan Presiden sesuai amanat Pasal 22 UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, serta implikasi negatif terhadap kualitas pelayanan kesehatan program JKN, Komisi IX DPR RI **memerintahkan BPJS Kesehatan untuk mencabut** Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

3. Terkait dengan kesimpulan rapat No.2, Komisi IX DPR RI mendesak untuk :
  - a. Kementerian Kesehatan RI mengkoordinasikan organisasi profesi untuk menyusun Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK) dalam rangka menjaga kendali mutu dan kendali biaya pelayanan JKN; dan
  - b. Kementerian Kesehatan RI, DJSN dan BPJS Kesehatan untuk selalu melibatkan organisasi Profesi dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan dalam setiap pembahasan peraturan dan kebijakan terkait pelaksanaan Program JKN.
4. Komisi IX DPR RI mendukung upaya Kementerian Kesehatan RI untuk memperbaiki tata kelola obat JKN dan mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk secara intensif dan terus menerus berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengimplementasikan upaya-upaya penanganan permasalahan pelayanan obat JKN termasuk perbaikan *e-katalog* dengan sistem *multi year*, *multi winner* dan *multi criteria*.
5. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI, DJSN dan BPJS Kesehatan untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota pada hari ini paling lambat tanggal 3 September 2018.

**Rapat diakhiri pukul 20.20 WIB.**

Ketua Rapat/  
Ketua Komisi IX DPR RI,



**DEDE YUSUF M.E, ST, M.I.Pol**  
A-415

